



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tarif angkutan naik sepihak
Tanggal : Selasa, 06 September 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Tarif Angkutan Naik Sepihak

Presiden Jokowi mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan penaikan harga BBM subsidi.

INSI NANTIKI JELITA
insi@mediaindonesia.com

TARIF angkutan di sejumlah daerah sudah mengalami kenaikan walaupun Kementerian Perhubungan belum mengeluarkan aturan tarif baru setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (3/9).

"Besar tarif akan ditentukan oleh kajian yang tengah kami lakukan, dan hasilnya akan kami sampaikan dalam waktu dekat," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan persnya, kemarin.

Ketua DPC Organda Kota Bekasi Indra Hermawan berdalih penaikan tarif terpaksa dilakukan, tetapi masih bersifat sementara sampai ada kesepakatan rapat bersama pemerintah daerah. Saat

ini, mereka sudah menaikkan tarif sepihak sebesar Rp500-Rp1.000.

"Kita masih tunggu rapat bersama pemerintah daerah untuk penetapan tarif yang layak," ujarnya.

Di Cirebon, Jawa Barat, sudah ada pula kenaikan tarif yang disebut tarif sementara. Untuk umum yang sebelumnya Rp4.000 menjadi Rp6.000, sedangkan pelajar dari Rp2.500 menjadi Rp4.000.

Di sejumlah daerah, tarif angkutan juga sudah naik untuk bus antarkota.

"Sekarang tarif sudah naik menjadi Rp50 ribu dari Rp40 ribu untuk rute Muntok-Pangkal Pinang," ujar Yudistira, pengelola jasa transportasi, di Muntok, Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung.

Tarif bus Palu-Poso di Sulawesi Tengah pun sudah naik dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per orang. Adapun tarif bus Palu-Makassar men-

jadi Rp450 ribu dari sebelumnya Rp350 ribu per orang.

"Kami sepakat menaikkan harga agar tidak rugi. Yah, penaikan harga itu tentu kami sesuaikan dengan pengeluaran kami," ujar pengusaha mobil bus di Palu, Andi Ishak.

Di Bogor, penaikan tarif angkutan sudah resmi dilakukan dengan terbitnya Keputusan Wali Kota Bogor bernomor 551.2/KEP.280-DISHUB/2022 tentang tarif angkutan umum jenis perlayanan angkutan kota tipe bus kecil kelas ekonomi di wilayah Kota Bogor, tertanggal 3 September 2022. Dengan demikian, tarif baru untuk pelajar menjadi Rp4.000 dari sebelumnya Rp3.000 dan umum menjadi Rp5.000 dari Rp3.500.

"Kita melakukan langkah cepat penyesuaian tarif. Kita akan monitor juga di lapangan untuk efeknya seperti apa," kata Wali Kota Bogor Bima Arya, kemarin.

Ketua Umum Asosiasi Industri dan UMKM Indonesia (Akumandiri) Heymawati Setyorinny mengatakan kenaikan harga BBM akan sangat berdampak pada ongkos produksi para pelaku UMKM. "Solusi terakhir, mau tidak

Langkah Kemenhub Tangani Penaikan Harga BBM untuk Sektor Transportasi

- Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
- Mendengarkan saran dan masukan dari berbagai pihak.
- Menyesuaikan tarif angkutan umum kelas ekonomi, khususnya pada moda transportasi darat.
- Besaran tarif akan ditentukan setelah kajian dilakukan dan hasilnya bakal disampaikan dalam waktu dekat.
- Segera menetapkan penyesuaian tarif ojek online.
- Penyesuaian tarif ojek online akan diumumkan dalam dua hari ke depan.

Bantuan Sosial untuk Ringankan Beban Masyarakat dan Pelaku Transportasi

Bantuan Sektor Angkutan Umum dan Perlindungan Sosial Tambahan



- Subsidi di sektor transportasi, diperlukan:
 - Sopir angkot
 - Ojek online dan ojek pangkalan
 - Nelayan

■ Pemda diminta menyisihkan 2% dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp2,17 triliun.

Bantuan Subsidi Upah (BSU)

- Anggaran : Rp9,6 triliun.
- Sasaran : 16 juta pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.
- Penyalur : Kementerian Ketenagakerjaan.

Sumber: Kementerian Perhubungan/Litbang MI

mau harus menaikkan harga meskipun sedikit. Tapi ini juga dilematis karena jika harga dinaikkan, otomatis akan berdampak juga pada daya beli masyarakat, artinya pendapatan UMKM akan turun," ungkapnya, kemarin.

Demo besar-besaran

Presiden Jokowi mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan penaikan harga BBM subsidi. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari budaya demokrasi sehingga pemerintah secara jelas tidak akan melarang.

"Ini kan negara demokrasi.

Kalau mau demo, sampaikan dengan cara-cara yang baik, ya," ujar Jokowi di Jakarta, kemarin.

Jokowi mengatakan hal itu terkait dengan rencana serikat buruh menggelar unjuk rasa besar-besaran untuk menolak penaikan harga BBM pada hari ini. Aksi tersebut dilakukan serentak di 33 provinsi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan akan ada puluhan ribu buruh yang turun ke jalan. Adapun unjuk rasa di Jakarta akan dipusatkan di depan Gedung DPR. (Tim Media/X-10)